



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Asep Zaelani Mulya^{1*}, Irfan Sanusi², Lukluk Atin Marfuah¹

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati,
Bandung

*Email : acbmadzjaelani23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga PKK di Desa Sundawenang. Dengan fokus penelitian pada prinsip, pendekatan serta strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada teori Hasdiansyah mengenai pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK di Desa Sundawenang menerapkan prinsip pemberdayaan berbasis partisipasi aktif, kemandirian, kesetaraan, dan keberlanjutan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan kebijakan desa (*top-down*) dengan inisiatif masyarakat (*bottom-up*). Strategi yang diterapkan mencakup pelatihan keterampilan ekonomi, penguatan kapasitas perempuan, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat; PKK; kesejahteraan sosial; ABCD

ABSTRACT

This research aims to analyze how community empowerment carried out by the PKK institution in Sundawenang Village. With a focus on the principles, approaches, and strategies of community empowerment. The research utilizes the Asset Based Community Development (ABCD) method with a qualitative approach, referring to Hasdiansyah's theory on community empowerment. The results show that the PKK in Sundawenang Village applies the principles of empowerment based on active participation, independence, equality, and sustainability. The approach used combines village policies (top-down) with community initiatives (bottom-up). The strategies implemented include economic skills training, strengthening women's capacity, and improving access to social services.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial dianggap sebagai suatu kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari setiap warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek penting yang mendukung tercapainya kualitas hidup yang baik, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta aspek spiritual dan sosial yang mendukung keseimbangan hidup.

Menurut RPJM Desa Sundawenang Tahun 2023-2028, pertumbuhan penduduk yang dialami cukup stabil, dari 7.369 jiwa pada 2023 menjadi 7.387 jiwa pada 2024. Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Namun, pertumbuhan ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan. Keterbatasan fasilitas di desa menjadi kendala utama. Masih banyak rumah tak layak huni, serta peluang kerja yang minim. Tantangan ini menuntut strategi pemberdayaan yang terarah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Penelitian ini memilih Desa Sundawenang karena karakteristik sosial-ekonominya yang relevan dengan kajian pemberdayaan masyarakat. Di sektor kesehatan, desa memiliki 6 tenaga medis dan 77 kader kesehatan. Namun, akses layanan kesehatan masih terbatas, terutama dalam program preventif dan promotif. Peningkatan jumlah kelahiran dan kebutuhan layanan kesehatan yang tinggi menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang efektif. Dalam bidang pendidikan, terdapat 25 guru yang tersebar di berbagai sekolah. Namun, akses pendidikan di beberapa dusun masih terbatas, memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah telah menyediakan berbagai program kesejahteraan sosial, namun umumnya program ini sering kali hanya digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan tidak cukup mendukung keberlanjutan kesejahteraan (Nurfadillah, 2019: 8). Banyak program dirancang dengan struktur yang ramah konsumen tanpa komitmen jangka panjang, sehingga kemiskinan akan kembali normal setelah bantuan selesai dilakukan. Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang cukup efektif adalah melalui pemberdayaan keluarga sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan keputusan Rakernas PKK tahun 2005, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diinisiasi sebagai gerakan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sejahtera, mandiri, serta memiliki kesadaran hukum dan lingkungan yang tinggi. Hasil observasi (2024) menunjukkan bahwa di Desa Sundawenang, PKK berperan sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis keluarga dengan mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua TP-PKK Desa Sundawenang, Fany Nopianti Ubad. Prinsip ini dijalankan secara sinergis melalui 10 program pokok PKK yang terintegrasi dengan inisiatif berbagai kementerian dan lembaga mitra. Pendekatan pemberdayaan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis bottom-up, dimulai dari identifikasi kebutuhan serta potensi lokal melalui musyawarah dan dialog terbuka agar solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Strategi pemberdayaan ini dilakukan melalui empat kelompok kerja (POKJA), yakni: POKJA 1 yang fokus pada pembinaan karakter keluarga, penguatan semangat gotong royong, sosialisasi keluarga sadar hukum, serta program PAAREDI dan pencegahan kekerasan anak; POKJA 2 yang menitikberatkan pada pendidikan dan peningkatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan seperti anyaman, tata boga, dan pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K); POKJA 3 yang memperkuat ketahanan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman obat dan sayur serta penyelenggaraan lomba cipta menu B2SA guna mendorong pola konsumsi yang bergizi, seimbang, dan aman; serta POKJA 4 yang mengedepankan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pelaksanaan Posyandu untuk balita dan lansia guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Beberapa penelitian relevan menunjukkan peran strategis PKK dan program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Dela Lestari (2020) berjudul “Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pemberdayaan Suhendar. Hasilnya menunjukkan bahwa PKK di Kelurahan Cipadung aktif menangani gizi buruk balita melalui posyandu, penyuluhan, dan pendampingan ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, Nyoman Wahyuni dan Ketut Candrawati (2024) dalam penelitian “Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marga Dauh Puri” juga memakai metode kualitatif dan menunjukkan bahwa PKK berperan luas dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama perempuan. Terakhir, Ade Sulistiawati (2022) dalam skripsinya “Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera Melalui Program Keluarga Harapan” menggunakan metode studi kasus dan teori Oos M. Anwas, menemukan bahwa PKH membantu meningkatkan

kesejahteraan keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon melalui bantuan bersyarat dan edukasi, khususnya dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada strategi pemberdayaan berbasis komunitas dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Hasdiansyah, serta menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD). Penelitian ini menemukan adanya upaya peningkatan ketahanan pangan dan keterampilan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat melalui PKK dengan cakupan multi-sektor yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penelitian ini juga menempatkan PKK sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat, bukan semata-mata sebagai pelaksana program bantuan.

Penelitian berlokasi di Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikamalaya, Jawa Barat, 46471. Penelitian ini memiliki keunikan karena menyoroti peran PKK sebagai motor penggerak pemberdayaan berbasis keluarga di tingkat desa. PKK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perempuan, tetapi juga sebagai wadah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Keunikan lainnya terletak pada bagaimana PKK mengadaptasi strategi pemberdayaan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, serta bagaimana mereka mengatasi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, dan kurangnya sinergi dengan kebijakan pemerintah desa.

Fokus penelitian mencangkup tiga aspek utama di antaranya mengenai prinsip, pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan lembaga PKK di Desa Sundawenang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKK tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Keberlanjutan dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Sundawenang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Asset Based Community Development (ABCD), yang berfokus pada identifikasi dan optimalisasi potensi lokal sebagai dasar dalam proses pemberdayaan. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada bagaimana individu/kelompok membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi. Kemudian data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis ini membahas beberapa konsep utama yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), khususnya di Desa Sundawenang. Teori-teori ini mencakup pemahaman tentang prinsip, pendekatan serta strategi pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip penting seperti: pertama, partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat terlibat dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk menciptakan rasa memiliki. Kedua, pendekatan berbasis kebutuhan, yang memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketiga, penguatan kapasitas, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar dapat mengelola program secara mandiri. Keempat, keadilan sosial dan kesetaraan, yang memastikan akses setara bagi semua masyarakat. Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yang mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan program. Keenam, kerjasama dan kemitraan, yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan program. Terakhir, keberlanjutan program, yang memastikan manfaat program berlanjut meski dukungan eksternal berakhir (Hasdiansyah, 2023: 49).

Menurut (Koentjaraningrat, 1990:5) dalam Noor, S (2019), kearifan lokal kemudian terwujud dalam unsur-unsur budaya yang meliputi sistem religi, sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1990:2). Kearifan lokal terwujud dalam tiga aspek, yaitu (1) gagasan, nilai, norma, peraturan, (2) pola perilaku, kegiatan yang kompleks, dan (3) artefak, budaya, bahan, benda budaya.

Dalam perspektif dakwah Islam, pemberdayaan disebut sebagai tamkin al-Dakwah yaitu aktifitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya (aghniya) ataupun yang miskin (fuqoro wa al-masakiin) untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan ummat (wahdat al-ummah) dalam perbedaan status sosial dan *income proverty* (Winanti, dkk. (2023: 423).

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui prinsip pendampingan yang meliputi belajar dari masyarakat, peran pendamping sebagai fasilitator, serta proses saling belajar dan berbagi pengalaman. Pendamping harus memahami bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan menggunakan pendekatan partisipatif untuk memahami kebutuhan mereka. Selain itu, pendamping berperan sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif masyarakat, bukan sebagai pengarah utama. Proses pemberdayaan juga menjadi

ajang untuk saling belajar, di mana pendamping dan masyarakat berbagi pengalaman guna memperkaya pemahaman serta menemukan solusi bersama (Sutikno et al., 2015: 21).

Menurut Effendi (2008) dalam (Bahri, 2019: 21), prinsip pemberdayaan masyarakat harus dilandaskan pada prinsip partisipasi, sustainable, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, *acceptable, profitable, replicable*. Kemudian, menurut Murthahhari (1991: 50) dalam Sanusi, I (2014: 89), Manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang berakal sadar, bebas dan bertanggungjawab. Dari hari pertama ketika manusia mencapai tahapan kemanusiaan tanpa memperhatikan kapan hal itu terjadi ia menjadi pembantu dan wakil tuhan. Tidak ada waktu sejak saat penciptaan manusia sejak bumi ada, tanpa kemaujudan seorang khalifah, kesaksian dari Allah, yaitu makhluk yang dianugerahi kebebasan, dan tanggung jawab. Semua itu menjadi bekal manusia untuk dapat membedakan antara kebaikan dan kejahatan.

Kedua, menurut Hasdiansyah (2023: 84), terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu; Pertama, pendekatan *Top-Down vs Bottom-Up*, adalah model pembangunan yang dipandu oleh pemerintah atau lembaga pusat. Sedangkan, pendekatan *Bottom-Up*, yang mengutamakan peran serta masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan program. Kedua, pendekatan berbasis gender berfokus pada identifikasi, pemahaman, dan penghapusan perbedaan gender, serta memberikan perang lebih aktif kepada perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga, pendekatan berbasis hak asasi manusia melibatkan pendidikan kesadaran tentang HAM, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, akses yang setara, penegakan hukum dan perlindungan hak, penghapusan deskriminasi, penguatan kapasitas individu dan kelompok.

Menurut Suharto (2005) dalam Afandi & Prathama (2022: 293), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lima pendekatan, yang mencakup; Pemungkinan menciptakan lingkungan yang mendukung potensi masyarakat untuk berkembang, seperti akses pendidikan dan kesempatan kerja. Penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi. Perlindungan melibatkan upaya mencegah eksploitasi kelompok yang rentan. Penyokongan memberikan dukungan seperti bantuan finansial dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang. Pemeliharaan menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok untuk memastikan partisipasi yang setara dan mencegah ketimpangan.

Ketiga, menurut Hasdiansyah (2023: 11), strategi pemberdayaan masyarakat merupakan uraian rinci mengenai pendekatan dan metode yang diterapkan untuk memperkuat komunitas serta individu agar mampu mengidentifikasi dan

menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri. Pertama, pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat mencakup berbagai aspek, termasuk pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan praktis. Kedua, pengembangan infrastruktur dan sumber daya lokal yang mencakup konsep dasar tentang bagaimana pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup, akses dasar, dan memfasilitasi infrastruktur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dengan memberikan akses, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola sumber daya yang mencakup pelatihan, pemberian modal usaha, pengembangan kewirausahaan dan upaya lainnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pemerataan pembangunan terutama di pedesaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa melalui berbagai bentuk program kegiatan pendidikan, pelatihan, keterampilan maupun pembangunan karakter atau watak. Peningkatan kualitas SDM ini bertujuan agar masyarakat terutama para generasi muda sebagai penerus di desa memiliki keinginan untuk membangun desa dengan daya mereka sendiri yang berasal dari sumber daya daerahnya (Uyun, dkk. 2023).

Menurut John, Icklis (2009) dalam Bahri (2019: 29), terdapat empat pendekatan utama dalam strategi pengembangan masyarakat, yaitu: Pertama, (*The Growth Strategy*) bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi secara cepat melalui peningkatan pendapatan per kapita, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja, yang diiringi oleh peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. Kedua, (*The Welfare Strategy*) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, (*The Responsive Strategy*) mendorong kemandirian melalui penyediaan teknologi dan sumber daya sesuai kebutuhan pembangunan. Keempat, (*The Integrated or Holistic Strategy*) menggabungkan unsur-unsur kunci dari ketiga strategi tersebut menjadi pilihan terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 Februari 2025, Ade Irsyadul Ubud selaku kepala desa, menurutnya Desa Sundawenang adalah sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya, terletak di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Keunikan desa ini terletak pada pelestarian tradisi Sasakala, sebuah warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Sundawenang resmi menjadi desa otonom hasil pemekaran dari Desa Neglasari pada 1 Juni 1980. Sebelumnya, seluruh wilayah Sundawenang masih menjadi bagian dari Desa Neglasari di Kecamatan Salawu. Desa ini pertama kali

dipimpin oleh Bapak Karyawan pada periode 1980-1982. Upaya pelestarian budaya di Desa Sundawenang berjalan dengan baik, tercermin dalam kehidupan sehari-hari warganya yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Setiap sudut desa memancarkan nuansa sejarah, sementara masyarakatnya dengan bangga melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan sejak zaman dahulu.

Desa Sundawenang, dengan luas wilayah 752,98 Ha, terletak di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, dan memiliki batas-batas wilayah yang mencakup Neglasari, Jahiang, Sukasari, Salawu, Karangmukti, dan Kawungsari. Jaraknya dari ibu kota Kecamatan adalah 6 Km, dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya adalah 28 Km, dan dari ibu kota Provinsi Bandung adalah 90 Km. Desa ini berada di daerah perbukitan dengan ketinggian antara 600 - 875 meter di atas permukaan laut, menjadikannya area yang subur untuk pertanian. Suhu rata-rata harian mencapai 31°C, dan curah hujan rata-rata adalah 1600 mm/tahun. Sumber air utama di desa ini adalah air permukaan dan air tanah, dengan pasokan irigasi berasal dari saluran-saluran dan air bersih untuk rumah tangga berasal dari PAM, sumur gali, dan sumur pompa.

Penduduk Desa Sundawenang berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2023 tercatat sebanyak 7.369 jiwa, tahun 2024 sebanyak 7.387 jiwa, sehingga mengenai penduduk Desa Sundawenang mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya sebagaimana kita lihat dalam tabel berikut ini (Data desa, 2024). Kemudian, dilansir dari data Desa Sundawenang (2024), desa ini memiliki luas wilayah 752,98 ha, terdiri dari 9 rw, 37 rt dan 5 dusun, yaitu Dusun Pasirangin, Sundawenang, Ciroyom, Sukasari dan Dusun Sukamenak, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1 Batas Wilayah Desa Sundawenang

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Neglasari	Salawu	Tasikmalaya
Sebelah Selatan	Jahiang, Sukasari	Salawu-Puspahiang	Tasikmalaya
Sebelah Timur	Salawu, Karangmukti	Salawu	Tasikmalaya
Sebelah Barat	Kawungsari	Salawu	Tasikmalaya

Sumber: Data Desa Sundawenang 2024

Jarak dari Desa Sundawenang ke ibu kota Kecamatan 6 km, jarak ke ibu kota Kabupaten Tasikmalaya 28 km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 90 km. Secara visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah Desa Sundawenang. Dalam konteks kondisi umum desa, Desa Sundawenang menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti

kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif ini, informan utama yang diambil berjumlah 5 orang, yaitu; Ibu Fany Nopianti (Ketua TP-PKK), Ibu Ida Budiawati (Kader PKK Dasawisma & Posyandu), Ibu Oyoh (Kader PKK & Pengrajin), Ibu Ade Juhanah (Kader PKK & Posyandu), Bapak Ade Irsyadul Ubad (Kepala Desa Sundawenang). Kelima informan ini dipilih secara purposive karena memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui lembaga PKK di Desa Sundawenang.

Prinsip Pemberdayaan Yang Diterapkan PKK

Pertama, partisipasi aktif masyarakat. keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK dan kader PKK bersifat relawan. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ini didorong oleh semangat dan komitmen para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fany menjelaskan,

Kami adalah relawan yang didorong oleh semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sifat relawan ini, kami dapat menjangkau lebih banyak individu dan keluarga, serta membangun rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat. Keberadaan relawan ini menciptakan suasana yang hangat dan akrab, di mana setiap anggota merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan. (Wawancara, 27 Februari 2025).

Melalui sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan TP-PKK, terutama program Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), PKK berupaya menumbuhkan kemandirian kaum perempuan. Program ini difokuskan pada peningkatan sumber daya perempuan serta akses dan kontrol mereka atas berbagai sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya agar mereka dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah keluarga dan menambah penghasilan demi menghindari kemiskinan. Salah satu bentuk pelatihan adalah Kader Kesehatan Jiwa (Keswa), yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kader dalam melayani kesehatan jiwa masyarakat. Pelatihan ini juga memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola dan mengakses sumber daya, sehingga mereka lebih mandiri, percaya diri, dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Kedua, pendekatan berbasis kebutuhan. salah satu prinsip utama yang dipegang oleh PKK adalah bahwa pemberdayaan harus berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu modal bagi masyarakat dalam menjadikan mereka pelaku utama yang memahami kondisi dan kebutuhan lokal. Fany menjelaskan,

Kami percaya bahwa setiap program yang kami jalankan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat, PKK tidak hanya memastikan bahwa program yang dijalankan relevan, tetapi juga membangun rasa memiliki di kalangan warga. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara PKK dan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas program. (Wawancara, 27 Februari 2025).

Fany menjelaskan bahwa dengan melalui rapat koordinasi, masyarakat dapat berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka melalui PKK Dasawisma dan juga PKK Dusun. Melalui rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan di tingkat dusun maupun desa, masyarakat memiliki ruang untuk berdialog secara langsung. Aspirasi mereka dapat disampaikan melalui perwakilan PKK Dasawisma maupun PKK Dusun. Jadi kalau ada usulan, keluhan, atau ide kegiatan, biasanya disampaikan lewat pengurus dasawisma untuk kemudian dibawa ke tingkat atas.

Ketiga, penguatan kapasitas yang dilakukan PKK dapat menjadi media yang masyarakat butuhkan untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan. Fany menjelaskan bahwa hal ini juga dapat berupa pendampingan dan penyediaan akses bagi masyarakat.

PKK berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan dan anak. Posyandu memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, khususnya ibu dan keluarga muda. Melalui penyuluhan rutin dan pembagian makanan tambahan (PMT), warga belajar pentingnya pola makan bergizi dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan mengenai imunisasi, perawatan kehamilan, dan penanggulangan penyakit ringan. Sebagaimana yang dipaparkan fany bahwa,

Kegiatan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) secara dini, terpadu, dan berkesinambungan. Program ini berfokus pada deteksi dini faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolestrol dan obesitas. Ida juga menerangkan bahwa, Posbindu ini bukan cuma tempat cek kesehatan, tapi juga tempat edukasi. Kita di sini dikasih penjelasan soal gaya hidup sehat, efek merokok, dan pentingnya deteksi dini. Bahkan ada konseling singkat dari petugas Puskesmas. (Wawancara, 7 Maret 2025).

Keempat, keadilan dan kesetaraan. Menurut Fany dalam wawancara, 7 Maret 2025, PKK itu bukan sekadar organisasi ibu-ibu, tapi punya peran besar

dalam menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan di masyarakat. Melalui kegiatan dasawisma, penyuluhan, pelatihan, dan pemberian bantuan mereka memastikan bahwa warga yang kurang mampu tetap mendapat perhatian, misalnya dengan diberi pelatihan usaha kecil, penyuluhan gizi, atau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah bentuk nyata dari keadilan sosial yaitu memberikan perhatian lebih kepada mereka yang paling membutuhkan.

Kelima, transparansi dan akuntabilitas. PKK memastikan bahwa setiap program yang mereka jalankan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat. Melalui rapat koordinasi, pengurus PKK selalu memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, proses, dan hasil dari setiap kegiatan. Ini termasuk informasi mengenai bantuan yang diterima, sumber dana, serta cara distribusinya. PKK juga bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan yang mereka lakukan. Akuntabilitas ini tercermin dalam setiap laporan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKK kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan tahunan, laporan kegiatan rutin, maupun dalam setiap musyawarah desa. Setiap program yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun keuangan.

Rakor bukan hanya sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang strategis tempat keterbukaan dan tanggung jawab dijunjung tinggi. Di forum inilah para pengurus PKK desa berdiskusi, menyampaikan laporan, mengoreksi program, dan mengusulkan langkah baru yang lebih relevan dan adil bagi masyarakat. Menurut Fany dalam wawancara, 27 Februari 2025 menjelaskan, Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata bahwa PKK bekerja bukan untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk masyarakat secara menyeluruh. Ketika laporan disampaikan terbuka, ketika anggaran dibahas bersama, dan ketika setiap suara didengar tanpa sekat jabatan, di sanalah kita melihat bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dihidupkan. Rakor tingkat kecamatan juga menjadi tempat saling belajar tiap desa yang sudah berhasil bisa berbagi praktik baik, sementara desa yang masih tertinggal bisa mendapat bimbingan langsung. Itulah wajah asli keadilan sosial: saling dukung, saling jaga, dan saling dorong maju.

Keenam, kerjasama dan kemitraan yang kuat. Untuk memastikan kemandirian masyarakat setelah program pemberdayaan selesai, PKK melakukan beberapa upaya strategis. Fany juga menjelaskan bahwa memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga individu dapat mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberdayaan keluarga. Pelatihan ini mencakup berbagai keterampilan, mulai dari menganyam, pertanian, hingga manajemen usaha kecil. Dengan memberikan

akses kepada masyarakat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, PKK berupaya menciptakan peluang bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, PKK juga membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan. PKK ingin masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Melalui pendekatan ini, PKK tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

PKK terintegrasi dengan UPTD Puskesmas kecamatan, Polsek, aparat desa serta Kader Keswa. Dengan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, PKK dapat mengakses berbagai sumber daya, baik dalam bentuk dana, pelatihan, maupun dukungan teknis. Melalui kolaborasi ini, PKK tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga meningkatkan kualitas pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyuluhan ini, setiap pihak membawa peran dan keahlian masing-masing yang saling melengkapi.

Ketujuh, keberlanjutan program. salah satu inisiatif yang diambil oleh PKK untuk memastikan kemandirian masyarakat adalah penciptaan program berkelanjutan seperti kelompok usaha bersama (KUB) UP2K. Fany menambahkan,

Masyarakat dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Ini adalah wadah di mana mereka bisa berbagi pengalaman, sumber daya, dan pengetahuan. KUB memberikan kesempatan bagi anggota untuk berkolaborasi dalam menjalankan usaha, sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi yang ada di komunitas mereka. (Wawancara, 27 Februari 2025).

UP2K tidak mengandalkan pola bantuan langsung yang bersifat instan. Sebaliknya, program ini berfokus pada peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha dan pendampingan usaha mikro agar keluarga mampu menciptakan sumber pendapatan secara mandiri. Melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan yang kuat, PKK di Desa Sundawenang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, sinergi dengan berbagai lembaga, dan keanggotaan relawan, PKK berhasil menciptakan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendekatan Pemberdayaan Yang Diterapkan PKK

Pertama, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025, Fany Nopianti sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sundawenang, menjelaskan bahwa dalam menjalankan

10 Program Pokok PKK, pendekatan yang digunakan tidak hanya terpaku dari atas ke bawah (*top-down*), tetapi juga memberikan ruang luas untuk partisipasi warga secara langsung (*bottom-up*). Menurutny, kebijakan dari pusat atau kabupaten tetap menjadi acuan utama, seperti dalam hal kampanye Gerakan Keluarga Sehat atau program HATINYA PKK. PKK mengikuti arahan dari kabupaten untuk menjaga arah dan keselarasan program, supaya kegiatan PKK sejalan dengan target pembangunan nasional dan provinsi, jelasnya. Namun, lanjut Fany, PKK tidak sekadar menyalurkan program yang sudah jadi. Justru, kekuatan utama PKK ada pada kemampuannya menyerap kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat dasawisma hingga dusun. Di sini PKK mengedepankan musyawarah. Lewat dasawisma, warga terutama ibu-ibu bisa menyampaikan langsung aspirasi mereka. PKK mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan setiap kader PKK di tiap wilayahnya.

Dalam praktiknya, forum rembuk warga dan rapat koordinasi dusun menjadi sarana penting untuk menyatukan suara warga. Hasil-hasil musyawarah tersebut kemudian dibawa ke dalam agenda kerja PKK desa dan dilaporkan juga dalam rapat koordinasi PKK tingkat kecamatan. Sementara itu, proses perencanaan program kerja PKK dilakukan dengan merujuk pada 10 program pokok PKK yang mencakup kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Fany dalam wawancaranya menjelaskan,

Kami mengacu pada program-program yang telah ditetapkan, seperti penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Contoh kegiatan yang dilakukan dalam program PKK meliputi: Kegiatan keagamaan (pengajian), Pelatihan dan penyuluhan pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila, Kumpulan rutin, Sosialisasi Keluarga Indonesia Lindung Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS). Program Pola Asuh Remaja di Era Digital (PAAREDI). Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarhum). Pembinaan untuk penurunan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita. Kegiatan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kegiatan Galeri Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi). Dalam proses perencanaan ini, semua pengurus PKK yang terdiri dari 25 anggota inti dan 185 anggota PKK Dasawisma yang tersebar pada setiap RT terlibat aktif, memastikan bahwa setiap suara dan kebutuhan masyarakat didengar dan dipertimbangkan.” (Wawancara, 27 Februari 2025).

PKK menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penguatan nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan kesehatan, serta sosialisasi hukum dan pola asuh anak di era digital. Seluruh perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara partisipatif, melibatkan pengurus inti serta anggota Dasawisma di setiap RT, sehingga memastikan bahwa setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Kedua, pendekatan berbasis gender. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) bukan hanya organisasi perempuan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan keluarga dan desa. Dalam praktiknya, PKK menjalankan pemberdayaan berbasis gender melalui berbagai program yang tidak hanya memfasilitasi perempuan sebagai objek, tetapi justru menjadikan mereka sebagai subjek perubahan sosial. PKK membuka ruang-ruang partisipasi aktif bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin komunitas, narasumber dalam penyuluhan, pelaku usaha mikro, hingga pengambil keputusan dalam musyawarah dusun dan desa. Dengan adanya forum seperti kelompok Dasawisma, perempuan dapat menyampaikan aspirasi, mengemukakan gagasan, dan berkolaborasi untuk menyusun program kerja.

Melalui kegiatan pengajian rutin, PKK tidak sekadar membina keagamaan, tetapi juga menerapkan pendekatan pemberdayaan berbasis gender secara inklusif dan bermakna. Dalam forum pengajian, perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga dan para lansia diberikan ruang aman dan suportif untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh pengetahuan yang meningkatkan kapasitas spiritual dan sosial mereka.

Menurut fany, Lewat pengajian, ibu-ibu bukan hanya diajak ngaji, tapi juga dilibatkan dalam diskusi soal peran perempuan, mendidik anak, bahkan membahas ekonomi rumah tangga. Di sinilah perempuan belajar saling menguatkan dan menyadari bahwa perannya di keluarga dan masyarakat itu penting. (Wawancara, 27 Februari 2025).

Forum pengajian juga dimanfaatkan sebagai media edukasi seputar kesetaraan gender dalam perspektif Islam, termasuk membahas hak perempuan dalam pendidikan, partisipasi publik, hingga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. PKK sering kali mengundang narasumber perempuan, seperti ustazah, bidan desa, atau penyuluh KB, yang memperkuat pesan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan.

Ketiga, pendekatan spiritual. Berbagai desa, termasuk di Desa

Sundawenang, kegiatan pengajian ibu-ibu PKK dilakukan secara rutin, baik di tingkat dusun maupun desa. Dalam wawancara yang dilakukan pada 27 Februari 2025, Fany menyampaikan: Lewat pengajian, kita tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar menghargai peran sebagai ibu, sebagai warga, dan sebagai pemimpin di rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang jadi lebih percaya diri, lebih sabar, dan lebih peka terhadap kebutuhan anak-anak dan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan tabligh akbar yang digelar dalam momen-momen tertentu, seperti bulan suci Ramadan atau peringatan hari besar Islam, menjadi ruang besar untuk penguatan nilai-nilai spiritual secara kolektif. Dalam acara ini, masyarakat diberi kesempatan untuk tidak hanya mendengar tausiah dari para ulama, tetapi juga berdiskusi mengenai isu-isu sosial dari perspektif keagamaan, seperti peran keluarga dalam menanggulangi stunting, pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang, hingga dorongan untuk saling membantu antar tetangga.

Pendekatan spiritualitas ini menjadi penting karena menyentuh akar kesadaran masyarakat, memperkuat motivasi internal untuk berubah dan berkembang. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak bersifat instruksional semata, melainkan menyentuh hati dan jiwa, mendorong masyarakat menjadi agen perubahan yang memiliki dasar nilai-nilai agama yang kuat. Melalui pengajian dan tabligh akbar, PKK membangun masyarakat yang berdaya secara ruhani, sekaligus membentuk ketahanan keluarga yang kokoh sebagai pondasi kemajuan desa. Pendekatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga tentang membina hati yang sehat dan pikiran yang tercerahkan.

Strategi Pemberdayaan Yang Diterapkan PKK

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sundawenang, Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) menerapkan berbagai strategi pemberdayaan yang terstruktur dan komprehensif. Hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Fany Nopianti Ubad, mengungkapkan bahwa strategi-strategi ini dirancang untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ABCD, semua aset ini tidak hanya dicatat, tetapi dihubungkan satu sama lain untuk menciptakan gerakan sosial yang kolektif dan berkelanjutan. PKK bertindak sebagai fasilitator utama yang mengorganisasi, memobilisasi, dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fany Nopianti selaku Ketua TP-PKK Desa Sundawenang, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKK telah berjalan dengan mengoptimalkan berbagai aset lokal yang dimiliki. Aset individu seperti keterampilan ibu rumah tangga dalam menjahit,

memasak, hingga mengelola posyandu menjadi kekuatan utama. Di sisi lain, komunitas seperti Dasawisma, kelompok pengajian, dan kelompok tani wanita berperan aktif dalam memperkuat jaringan sosial desa. Secara kelembagaan, PKK menjalin kemitraan dengan Pemerintah Desa, Puskesmas, dan dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan program. Aset fisik seperti Balai Desa, sekretariat PKK, dan lahan pekarangan dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang belajar dan produksi. Dari sisi ekonomi, UP2K dan hasil pekarangan telah menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga. Selain itu, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, serta semangat religius dan kekeluargaan, memperkuat semangat partisipasi dan kemandirian dalam setiap kegiatan PKK.

Pertama, pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Menurut fany, pemberdayaan masyarakat tidak akan pernah terwujud tanpa peningkatan kapasitas dan keterampilan. Inilah yang menjadi landasan gerakan PKK dalam membina dan memperkuat peran masyarakat, terutama perempuan dan keluarga, sebagai pilar utama pembangunan sosial. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan.

Kami di PKK percaya bahwa membangun desa itu harus dimulai dari keluarga. Jadi, semua kegiatan kami dirancang untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu. Baik itu keterampilan, pendidikan keluarga, sampai ke kesehatan. Kami ingin ibu-ibu bukan hanya tahu teori, tapi bisa praktik langsung di rumahnya. Contohnya ada pengajian rutin terus kami juga adakan sosialisasi untuk lindungi anak dari kekerasan seksual, dan PAAREDI itu tentang pola asuh remaja di zaman digital ini. Supaya ibu-ibu melek informasi juga, tahu bagaimana mendidik anak dengan cara yang baik sesuai zaman. Kita aktif di pembinaan PHBS, kerja sama juga sama Puskesmas untuk penurunan stunting, AKI, dan AKB. Kami ajak ibu-ibu ikut Posyandu, kami edukasi tentang gizi, kebersihan lingkungan, dan cara masak sehat tapi tetap hemat. Jadi semua bisa diterapkan. (Wawancara, 27 Februari 2025).

Strategi pengembangan kapasitas juga diwujudkan melalui sosialisasi KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual) dan Kadarhum (Keluarga Sadar Hukum), sebagai bentuk penguatan literasi hukum dan perlindungan anak dalam keluarga. Ini adalah bentuk nyata upaya PKK untuk membangun keluarga yang sadar akan hak dan kewajiban dalam bingkai HAM.

Lebih jauh, melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), PKK juga mengembangkan keterampilan ekonomi masyarakat. Ini mencakup pelatihan keterampilan rumah tangga, pengelolaan usaha mikro, pengemasan produk lokal, hingga promosi usaha melalui media digital.

Pendekatan ini secara langsung mendukung kemandirian ekonomi keluarga dan membuka jalan ke arah pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif lokal.

Aktivitas mengayam menggambarkan bagaimana kader PKK tidak hanya berperan dalam kegiatan sosial dan kesehatan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam melestarikan kearifan lokal serta mendukung perekonomian keluarga melalui keterampilan tradisional. Anyaman bambu ini merupakan bagian dari upaya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), sekaligus mencerminkan semangat pemberdayaan.

Menurut Oyoh, salah satu kader PKK dalam wawancara pada tanggal 6 Maret 2025, beliau menuturkan bahwa keterampilan dalam membuat anyaman bambu sejatinya bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya lokal yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur. Dalam pandangannya, kerajinan anyaman bukan hanya produk fungsional, tetapi juga cerminan dari identitas dan kekayaan tradisi masyarakat desa. Menurutnya, kehadiran PKK sangat berperan besar dalam mendukung proses ini. PKK tidak hanya menjadi ruang aman bagi para ibu untuk saling berbagi dan belajar, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam menyampaikan informasi, pelatihan, serta bimbingan mengenai pengembangan usaha rumah tangga.

Kedua, pengembangan infrastruktur dan sumber daya lokal. PKK tidak hanya fokus pada pembangunan manusia, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya lokal. Dalam banyak kasus, kelompok PKK bekerja sama dengan aparat desa untuk mengusulkan perbaikan sarana publik seperti Posyandu, taman bacaan, tempat pelatihan usaha, hingga ruang serbaguna untuk kegiatan sosial.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025, Fany menyampaikan bahwa sarana Posyandu yang kini digunakan oleh masyarakat Kp. Sundawenang baru saja selesai dibangun pada akhir tahun 2023 dan gambar ini diambil pada tanggal 16 September 2024. Menurutnya, keberadaan bangunan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak.

Posyandu ini jadi tempat utama kami untuk melakukan penimbangan, imunisasi, hingga penyuluhan. Kami bersyukur karena sekarang warga lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Dulu, ibu-ibu harus ke dusun tetangga. Sekarang, cukup datang ke Posyandu di sini, tambahanya.” (Wawancara, 27 Februari 2025).

Selain itu, PKK juga aktif menggali potensi lokal seperti hasil kebun,

tanaman herbal, atau kuliner tradisional untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. Salah satu kebun keluarga binaan PKK yang ditanami berbagai jenis Tanaman Obat Keluarga (TOGA) seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan sereh, serta tanaman sayuran seperti kangkung, bayam, cabai, singkong, dan talas. Kebun ini memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Penanaman dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pupuk organik dari limbah rumah tangga.

Kegiatan berkebun ini tidak hanya menjadi wujud nyata pemanfaatan sumber daya lokal, tetapi juga merupakan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh kader PKK, masyarakat diajak untuk mengelola hasil kebun tidak hanya untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk dijual dalam bentuk olahan sederhana seperti keripik singkong, talas kukus, serta paket sayuran segar. Dengan demikian, kebun ini memberikan nilai tambah secara ekonomis, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, kebun TOGA juga menjadi sarana edukasi untuk anak-anak dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya hidup sehat, penggunaan obat alami, dan menjaga lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, model kebun seperti ini dapat menjadi contoh praktik baik pemberdayaan keluarga berbasis lingkungan dan ekonomi lokal.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Melalui program UP2K PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), PKK mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif rumah tangga. Kelompok-kelompok usaha kecil dikuatkan dengan pelatihan manajemen, bantuan permodalan, hingga akses pasar.

Menurut fany, Setiap produk yang dipamerkan merupakan hasil kreativitas ibu-ibu PKK dan lansia yang tergabung dalam kelompok usaha dan keterampilan lokal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi terhadap peran para lansia, tetapi juga menjadi ruang produktif untuk menunjukkan bahwa usia lanjut bukanlah batasan untuk terus berkarya dan berkontribusi. (27 Februari 2025).

Stand kerajinan tangan milik warga Desa Sundawenang yang dipamerkan dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26. Stand tersebut dihiasi dengan nuansa khas pedesaan yang sederhana namun penuh makna, menampilkan hasil karya masyarakat yaitu anyaman bambu seperti nyiru, boboko, aseupan, ayakan, tas, dll. Stand ini turut menjadi simbol pemberdayaan masyarakat berbasis budaya dan potensi lokal, serta menjadi bagian dari semangat gotong royong antar generasi. Kehadirannya dalam peringatan HLUN ke-26 memberikan pesan kuat bahwa kesejahteraan lansia tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan, tetapi juga dari pengakuan terhadap eksistensi dan karya mereka

di tengah masyarakat.

Secara sosial, PKK aktif mempromosikan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender melalui diskusi kelompok, kegiatan edukatif, serta forum musyawarah yang inklusif. Dalam ranah budaya, PKK juga menjaga warisan budaya lokal melalui pelestarian adat, bahasa daerah, dan nilai gotong royong. PKK itu bukan cuma ibu-ibu masak dan rapat, tapi kita yang menjaga semangat kampung, membangun ekonomi, dan menjaga nilai-nilai yang mulai luntur.

PENUTUP

Berdasarkan tinjauan terhadap fokus dan hasil penelitian yang ada, berikut adalah simpulan yang dapat diuraikan:

Prinsip pemberdayaan yang diterapkan PKK meliputi; partisipasi aktif masyarakat, pendekatan berbasis kebutuhan, penguatan kapasitas, keadilan sosial dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, kerjasama serta keberlanjutan program. Pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan bantuan melainkan tentang membuka ruang agar masyarakat dapat berperan aktif, membangun kesadaran akan potensi diri, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, PKK menjadi model nyata lembaga yang tidak hanya menjalankan program, tetapi juga menghidupkan semangat pemberdayaan masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Pendekatan pemberdayaan yang diterapkan PKK dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama. Pertama, *Top-Down* dan *Bottom-Up*, di mana program PKK mengikuti arahan dari pemerintah pusat, namun tetap memberi ruang besar bagi partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menjalankan kegiatan. Kedua, pendekatan berbasis gender yang mendorong perempuan aktif berperan serta terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Ketiga, pendekatan berbasis hak asasi manusia yang tampak dalam kegiatan edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan di masyarakat. Pendekatan ini saling menguatkan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, mandiri dan berakar pada nilai-nilai lokal serta keagamaan.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh PKK dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama. Pertama, pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat, yang dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan keterampilan praktis agar warga lebih mandiri dan produktif. Kedua, pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti pemanfaatan pekarangan, sarana posyandu, dan potensi usaha keluarga yang mendorong ketahanan ekonomi desa. Ketiga, pemberdayaan ekonomi melalui

UP2K dan pemanfaatan pekarangan rumah. Dari segi sosial dan budaya, kegiatan gotong royong, pengajian, serta poal asuh berbasis nilai keagamaan turut memperkuat kohesi sosial masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi pengetahuan, kebersamaan, dan nilai-nilai lokal untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Saran, dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, diperlukan pelatihan keberlanjutan bagi kader PKK dalam bidang manajemen program, pengorganisasian masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital guna memperluas jangkauan program dan efektivitas komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, hal ini juga diharapkan tidak hanya mampu menasar ibu rumah tangga, tetapi juga perempuan muda, sehingga kaderisasi dapat berjalan lebih efektif. Perlu dilakukan perbaikan dalam aspek kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain adalah memperbaiki tranparansi kegiatan, menyediakan forum diskusi rutin dengan warga, serta memperluas pelibatan generasi muda serta laki-laki dalam program kesejahteraan keluarga agar pemberdayaan tidak hanya terfokus pada perempuan yang berusia, tetapi juga mencakup seluruh anggota masyarakat. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis dampak dari program PKK terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program di berbagai konteks desa yang berbeda. Sehingga, hal ini diharapkan program pemberdayaan masyarakat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sundawenang maupun wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat J. W. Suwendi, Abd. Basir (ed.); Pertama). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Afandi, Y., & Prathama, A. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Aplikasi Elektronik Bumdesa Sugihwaras (e-BES) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Afriansyah, et al. (2023). Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Edited by Afriansyah. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Alim, et al. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Dan Strategi*. Edited by Yusuf Seyawan, Wawan; Efendi. Pertama. Kediri: PT. Gaptek Media Pustaka.
- Amelia, N., Efendi, D.I., & Marfuah, L. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Jurnal Ilmu Dakwah*.

- Bahri, Efri. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Destriana, et al. (2019). *Membangun Tingkat Kepedulian Masyarakat Desa Akan Pentingnya Kesehatan Melalui Program Lokakarya Mini*. KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan.
- Fahmi, M., Hasanah, N., & Afiva. (2013). *Lembaga Kemasyarakatan Dan Fungsinya Sebagai Kontrol Sosial Di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Fitramadhana, R. (2023). *Education in the Midst of Indonesia's Development Agenda*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis.
- Gustini, Y., Sanusi, I., & Muchtar, K. (2019). *Upaya Pemerintah dalam Membentuk Citra Purwakarta Melalui Kearifan Lokal*. Reputation: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
- Hasdiansyah. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Helaluddin. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurfadillah, S. U. (2019). *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang*. Comm-Edu (Community Education Journal).
- Nurkholis, et al. (2020). *Penerapan Geolokasi Pada Absensi Fasilitator Program Padat Karya Pemerintah Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Indonesia*. INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi.
- Noor, S. (2019). *Dakwah Berbasis Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Adat Melayu Seloko Jambi*. Ilmu Dakwah: Jurnal Akademik Kajian Homiletik , 13 (2), 233–249. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v13i2.7328>
- Kuswardinah, Asih. (2017). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: UNNESPRESS.
- Lenaini, Ika. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah.
- Putri, A. (2019). *Potensi Wilayah Beberapa Daerah Di Indonesia Dan Cara Mengembangkan Potensi Wilayah Agar Bermanfaat Bagi Warga Sekitar*. Jurnal Geografi.
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa Publishing.
- Safyuddin, et al. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.
- Sanusi, I. (2014). *Pemikiran Muthahhari tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah*. Ilmu Dakwah: Jurnal Akademik Kajian Homiletik , 6 (1), 76–100. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i1.328>

- Sari, F., & Najicha, F. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Sutikno, S., et al. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Uyun, A.S., Rifa'i, A.B., & Marfuah, L.L. (2023). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Taman Baca Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7 (2).
<https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i2.24487>
- Wahyuni, N., & Candrawati, K. (2023). Peran Pkk Dalam Perberdayaan Masyarakat Di Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Ilmu Administrasi Negara: STISIP Margarana Tabanan*
- Winanti, Puspa & Safei, Agus & Marfuah, Luk. (2023). Peran Pimpinan Pusat Pelatihan Quail Farm Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 7. 10.15575/tamkin.v7i4.20459.